

REVISI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

PUTUSSIBAU 2019



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunianya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan di tahun 2019 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 merupakan rencana kinerja tahun pertama yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021. Renja Dinas Perhubungan menggambarkan target kinerja tahun 2019 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja Dinas Perhubungan ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini.

Putussibau, Juli 2018

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

Drs. H. ABDUL HALIM

Pembina TK. I

NIP.19600410 198910 1 002

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2017	7
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan.....	7
B. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	16
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	19
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/RENSTRA Dinas Perhubungan	20
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	25
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	25
B Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Perhubungan.....	27
C Program dan Kegiatan.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN.....	30
BAB V PENUTUP.....	33

MATRIK RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Sebelum Rencana Kerja (Renja) ditetapkan menjadi dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang definitif, harus melalui beberapa tahap proses penyusunan Rancangan Renja SKPD hingga menjadi Renja RKPD yang definitif.

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Ketentuan Undang- Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja)

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2016-2021 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu dinas daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 61 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan implementasi dari berlakunya Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu membidangi 1(satu) urusan wajib, yakni urusan Perhubungan. Urusan ini sangat menunjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu

Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau disebut juga dengan Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan tingkat SKPD. Penyusunan renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban untuk memajukan dan membangun bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu SKPD juga memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan tingkat SKPD, yang terdiri dari Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dan Renja SKPD untuk perencanaan tahunan. Dalam hal ini dokumen yang disusun Dinas Perhubungan, adalah Rencana Kerja Dinas Perhubungan atau disebut dengan Renja Dinas Perhubungan tahun 2019.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 sebagaimana diamanatkan oleh aturan hukum yang berlaku mengacu kepada RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 dan berpedoman kepada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 -

2021. Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, khususnya lampiran II (kedua) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Secara ringkas penyusunan Renja Dinas Perhubungan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :

- I. **Tahapan Persiapan;** meliputi proses (1) Pembentukan SK tim penyusun renja (2) Orientasi tim kerja (3) Penyusunan agenda tim kerja (4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan renja Dinas Perhubungan
- II. **Tahapan Penyusunan rancangan renja Dinas Perhubungan tahun 2019;** meliputi proses (1) penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten tahun 2019 dan renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 (2) mengacu pada evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya (3) memecahkan masalah yang sedang dihadapi (4) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
- III. **Pelaksanaan Forum SKPD.** Peserta forum SKPD terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan, SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota. Dimana teknik pelaksanaan forum SKPD tidak diatur secara rinci dalam Permendagri 54 tahun 2010, namun disarankan agar dapat dilakukan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan (Permendagri 54/2010 pasal 149 ayat (2). Adapun tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk :
 - a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD.

Hasil pelaksanaan forum SKPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan forum SKPD, berita acara forum SKPD dijadikan bahan dalam penyempurnaan rancangan renja SKPD. Dimana penyempurnaan seluruh rancangan renja SKPD menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD yang akan dijadikan bahan dalam Musrenbang RKPD tahun 2019.

IV. Penetapan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019. Proses penetapan Renja Dinas Perhubungan dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan adalah melakukan penyempurnaan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap renja Dinas Perhubungan oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Dinas Perhubungan sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi renja RKPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh kepala Dinas Perhubungan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, proses akhir adalah ditetapkannya Renja Dinas Perhubungan 2019 melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan pada Tahun 2019 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 – 2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 – 2034;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2034;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Tujuan penyusunan Renja :

- 1) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2019 sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
- 2) Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- 4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari :

- A. Latar Belakang,
- B. Landasan Hukum,
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU terdiri dari:

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan,
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan,
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan,
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD,
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN terdiri dari :

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan,
- C. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN.

BAB V PENUTUP.

LAMPIRAN : MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021, Dinas Perhubungan memiliki visi :

“Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera Berdaya Saing dan Harmonis”.

Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :

- 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih**
- 2. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019 melaksanakan 2 urusan, 8 program, dan 40 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2016–2021. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2018 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian % Keuangan	Capaian % Kinerja
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.415.122.500,00	715.780.937,00	50,58%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.650.000,00	2.550.000,00	20,16%	200 Lr
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	67.200.000,00	12.192.587,00	18,14%	12 Bulan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan	12.000.000,00	00,00%	00,00%	5 Unit
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	86.100.000,00	40.660.000,00	47,22%	15 Org
5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	88.157.000,00	41.242.500,00	46,78%	6 Org

6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000,00	10.350.000,00	41,40%	38 Unit
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.710.000,00	13.418.050,00	34,66%	1249 Buah
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.852.000,00	4.960.000,00	15,10%	77 Lbr/Buku
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.129.000,00	2.983.000,00	41,84%	12 Bulan
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	16.560.000,00	3.060.000,00	18,48%	5 Penerbit
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	115.000.000,00	55.790.000,00	48,51%	12 Bulan
12	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	387.000.000,00	246.766.000,00	63,76%	39 OK
13	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	186.475.000,00	131.510.000,00	70,52%	91 OK
14	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	37.444.500,00	9.614.800,00	25,68%	25 Dok
15	Penyusunan RKA dan DPA	2.445.000,00	1.234.000,00	50,47%	3 Dok
16	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	293.400.000,00	137.450.000,00	46,85%	15 Org
17	Penyediaan Jasa Publikasi	7.000.000,00	2.000.000,00	28,57%	10 Iklan
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	428.000.000,00	293.166.000,00	68,50%	
18	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000,00	147.287.000,00	98,19%	8 Unit
19	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional	278.000.000,00	145.879.000,00	52,47%	5 Unit
III	Program peningkatan Disiplin aparatur	127.400.000,00	127.314.000,00	99,93%	
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	88.200.000,00	88.154.000,00	99,95%	98 Stel
21	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	39.200.000,00	39.160.000,00	99,90%	49 Stel
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	193.940.000,00	9.115.000,00	4,70%	
22	Pendidikan dan pelatihan Formal	193.940.000,00	9.115.000,00	4,70%	12 org
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	47.489.850,00	00,00	00,00%	
23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.431.850,00	00,00	00,00%	1 Dok
24	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	37.200.000,00	00,00	00,00%	4 persil
25	Penyusunan LPPD	5.858.000	00,00	00,00%	1 dok
VI	Peningkatan Pelayanan Angkutan	838.297.650,00	438.647.174,00	52,33%	
26	Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	151.250.000,00	115.231.500,00	76,19%	12 Bulan
27	Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	137.395.150,00	64.317.250,00	46,81%	10 Lokasi

28	Manajemen lalu lintas angkutan sungai dan danau	148.865.500,00	75.201.624,00	50,52%	5 Lokasi
29	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	46.242.500,00	00,00	00,00%	3 Orang
30	Koordinasi Dalam Pelayanan Angkutan Tingkat Provinsi	135.000.000,00	111.765.000,00	82,79%	14 Dinas
31	Fasilitas Perhubungan di Bidang ASDP	99.499.000,00	99.492.911,00	99,99	12 Bulan
32	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas ASDP	72.380.000,00	62.461.300,00	86,30%	5 Unit
33	Pelayanan KIR Keliling	41.000.000,00	9.670.500,00	23,59%	200 Unit
34	Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Lokasi Parkir	106.164.500,00	00,00	00,00%	5 Lokasi
VII	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	4.380.000.000,00	93.263.000,00	2,13%	
35	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	1.450.000.000,00	24.785.000,00	1,71%	3 Unit
36	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	1.330.000.000,00	68.478.000,00	5,15%	16 Unit
37	Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan (ANGKODES)	1.500.000.000,00	00,00	00,00%	5 Unit
38	Perencanaan untuk DED Pembangunan Dermaga Penyeberangan	100.000.000,00	00,00	00,00%	1 Paket
VIII	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	880.000.000,00	261.848.000,00	29,76%	
39	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Darat	330.000.000,00	2.750.000,00	0,83%	2 Paket
40	Penyediaan Lampu Jalan Kota	550.000.000,00	259.098.000,00	47,11%	3 Paket
		10.993.289.000,00	3.127.508.741,00	28,45%	100%

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

Dari 40 kegiatan yang dilaksanakan, kinerja kegiatan dengan pencapaian keseluruhan nilai rata-rata sebesar 100%. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada Tabel II.

Tabel II
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Evaluasi Nilai SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu	B	
Meningkatnya Kelancaran dan Pelayanan Transportasi	Porsentase jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi baik	60%	
	Porsentase Pelayanan Angkutan Darat dan Sungai	65%	

- Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018: Rp. 10.993.289.000,00
- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018: Rp. 3.127.508.741,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Kapuas Hulu sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel III.

Tabel III
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan	Indikator Kinerja (out come) Program Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2017	
								Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+ 7+9)	11=(10/4)
1				URUSAN WAJIB									
1	02	09		PERHUBUNGAN									
			01	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Capaian peningkatan pelayanan angkutan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Registrasi dan Pendataan Kendaraan Motor	Tersediannya data regitsrasi dan data motor air	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			2	Pengawasan dan Patroli Lalu Lintas	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			3	Pengawasan dan Patroli Sungai dan Danau	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalur Sungai dan Danau	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas ASDP	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan bagi Masyarakat pengguna jalur Air	5	5	5	5	100%	5	5	100%
			5	Pengoperasiaan Bus Sekolah	Terlaksananya angkutan sekolah	2	2	2	2	100%	2	2	8%
			6	Pelayanan KIR Keliling	Terlayaninya pengguna jasa KIR di Kecamatan	60	12	12	12	100%	12	12	1000%
			7	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	2	2	2	2	100%	2	2	100%

			02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Capaian peningkatan pelayanan angkutan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Sungai	Tersedianya Halte untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan	200	84	23	23	100%	30	30	15%
			2	Pengadaan Angkutan Pedesaan (ANGKUDES)	Terlaksananya Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan	23	1	5	1	20%	10	5	22%
			3	Penyediaan Jasa Konsultasi dan Perencanaan Prasarana ASDP	Tersedianya Data Desain dan Kelayakan Dermaga	5	1	4	1	25%	5	5	100%
		03	03	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Sungai dan Danau	Terpasangnya rambu-rambu sungai dan danau	400	75	23	23	100%	50	40	10%
			2	Pengadaan Rambu rambu lalu Lintas Darat	Tingkat Keamanan dan Ketertiban berlalu Lintas di jalan	1200	345	165	165	100%	100	165	14%
		04	04	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Capaian Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pengadaan Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	20	8	8	8	100%	5	8	40%
		05	05	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%

			3	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Terlaksananya Penyusunan RENSTRA DISHUB	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	Tersusunnya data asset DISHUB	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Meningkatnya tertib administrasi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			6	Pemantuan dan Pengendalian Program Kerja Bidang	Terlaksanakannya Pemantauan dan Pengendalian Program kerja setiap bidang	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			7	Penyusunan Pembuatan Sertifikat Terminal dan Balik Nama Sertifikat Tanah	Terlaksanakannya Pembuatan Sertifikat Tanah terminal dan balik nama sertifikat tanah	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		06	06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pendidikan dan pelatihan Formal	Meningkatnya kemampuan Aparatur Dishub								
		07	07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pekerjaan kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
		08	08	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	80,87%	74,80%	77,83%	77,83%	100,00%	77,83%	77,83%	96,2%
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Terpenuhi Kebutuhan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik	60	12	12	12	100%	12	12	100%

			3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan	Terlaksananya Kelengkapan Surat menyurat Kendaraan Dinas/Operasional	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase kegagalan dalam pelaksanaan administrasi keuang	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			5	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Terwujudnya kebersihan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya kualitas sarana kerja agar lebih produktif	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya Peningkatan Administrasi Perkantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya tingkat kecukupan kebutuhan kantor atas barang	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksannanya Peningkatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat kecukupan tersedianya peralatan dan perlengkapan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Terpenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya pemenuhan atas kebutuhan makan dan minum	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			13	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Tingkat kesesuaian pelaksana tugas pokok dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			14	Rapat-Rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%

			15	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase kegagalan pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			16	Penyusunan RKA dan DPA	Meningkatnya kesesuaian sasaran dengan tugas dan fungsi	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			17	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi dikantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
			18	Penyediaan Jasa Publikasi	terpenuhinya keperluan spanduk dan iklan koran	60	12	12	12	100%	12	12	100%

2. Pendapatan

Dinas Perhubungan merupakan salah satu SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun target dan realisasi pendapatan yang dikelola sebagaimana Tabel IV berikut.

Tabel IV
Target dan Realisasi PAD Tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			
	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	90.000.000,00	24.505.000,00	27,22%
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	88.000.000,00	23.517.000,00	26,72%
3	Retribusi Terminal			
	Pelayanan tempet parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis Umum	27.500.000,00	4.030.000,00	14,65%
4	Retribusi Pelabuhan			
	Restribusi Jasa ke Pelabuhan	49.500.000,00	17.030.000,00	34,40%
5	Retribusi Penyeberangan Air			
	Retribusi Penyeberangan Barang	5.500.000,00	14.000.000,00	254%
6	Retribusi Ijin Trayek			
	Retribusi Ijin rayek	5.500.000,00	2.000.000,00	36,36%
7	Retribusi Administrasi Kapal			
	Retribusi Administrasi Kapal	5.000.000,00	00,00	00,00%
Jumlah		271.000.000,00	85.082.000,00	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2018

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Tabel V.

Tabel V
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun	
					2016	2017	2018	2019	2010		2016	2017	2018	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Urusan Perhubungan													
A	SPM													
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang aringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75		%	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan elah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan n/Kota.	23		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100		%	8	50	100	100	100	100	8	50	100	100
4	Tersedianya terminal angkutan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40		%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, lan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60		%	13	15	16	17	18	18	12,7	14,5	17	18
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 1000 (se ribu) kendaraan wajib uji.	60		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal	50		%	65	65	65	65	65	65	65	65	100	100

8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor	100		%	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan bupaten/Kota.	40		%	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100		%	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B	IKK													
1	Angkutan darat (jumlah angkutan umum/ jumlah angkutan darat)		-	%	6,1	3,3	5	5	5	5	6,1	3,3	5	5
C	Indikator Kinerja RPJMD													
1	Capaian peningkatan sarana prasarana perhubungan			%	61,88	78,55	78,74	95,25	95,49	95,49	61,88	78,55	95,25	95,49
2	Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas			%	38,62	39,08	39,41	40,21	40,7	40,7	38,62	39,08	40,21	40,7
3	Capain peningkatan pelayanan angkutan			%	74,8	77,83	77,83	77,83	80,87	80,87	74,8	77,83	77,83	80,87

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, social budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah :

1. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kelesuan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
3. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi social dan sumber-sumber informasi masyarakat.

Faktor-faktor penghambat yang berpengaruh diantaranya :

1. Sarana dan prasarana kantor, terminal dan pengujian yang belum optimal sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas;
2. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas;
3. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
4. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
5. Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan diwilayah Kabupaten;
6. Kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang;
7. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten pada bidang perhubungan.

Adapun faktor - faktor pendorong dalam pelayanan Dinas Perhubungan untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah:

1. Adanya visi dan misi dinas.
2. Perencanaan daerah yang mengakomodir urusan perhubungan .
3. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
4. Adanya komitmen yang tinggi dari sebagian besar pegawai yang berkreasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas.
5. Kerjasama dan koordinasi yang mantap antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019 mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ;
4. Peningkatan SDM baik melalui ketrampilan maupun kemampuan teknis, administrasi dibidang perhubungan.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas. Tema pembangunan tahun 2019 berdasarkan RPJMD Tahun 2016 - 2021 adalah **“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”**.

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2019 adalah :

- a. Peningkatan ekonomi masyarakat
- b. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- c. Percepatan peningkatan infrastruktur

- d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja
- e. Pengembangan kapasitas pemerintahan.
- f. Peningkatan kualitas pengelolaan SDA.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel VI.

Tabel VI
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Tahun 2018

No.		Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikator	Target Pagu indikatif		
		Kegiatan		Kinerja	Capaian	(Rp. 000)	Kegiatan		Kinerja	Capaian (Rp. 000)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		URUSAN PERHUBUNGAN					URUSAN PERHUBUNGAN					
	I	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20%		Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20%		
	1	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Kab. Kapuas Hulu	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah	12 bln	11.7060	Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran	Kab. Kapuas Hulu	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Terbayarnya perijinan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 , Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan, Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpeliharanya peralatan kerja, Tersedianya pembayaran gaji upah sopir, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, Tersedianya sarana surat kabar dan majalah	12 bln	55.00	
	2	Penyediaan jasa keuangan	Kab. Kapuas Hulu .	Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.	12 bln	79.800	Penyediaan jasa keuangan	Kab. Kapuas Hulu .	Terpenuhinya Pembayaran Honor PPK 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Bendahara Penerimaan 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.	12 bln	79.800	

No.		Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikator	Target Pagu indikatif		
		Kegiatan		Kinerja	Capaian	(Rp. 000)	Kegiatan		Kinerja	Capaian	(Rp. 000)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Kab. Kapuas Hulu .	Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 bln	144.280	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Kab. Kapuas Hulu .	Tersedianya makanan minuman rapat koordinasi dan jamuan tamu, tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 bln	144.280	
	II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	95,31%		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	95,31%		
	1	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya 2 kendaraan dinas/operasional, 2 unit Bis Sekolah	4 jenis	216.000	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya 2 kendaraan dinas/operasional, 2 unit Bis Sekolah	4 jenis	216.000	
	2	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu .	Terpeliharanya aset AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM	23 unit	66.000	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Kapuas Hulu .	Terpeliharanya aset AC, komputer, laptop, mesin ketik dan printer, terbayarnya jasa pemeliharaan sarpras perkantoran, tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor, tersedianya BBM	23 unit	2.582.044	
	III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	95,31%		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95,31%	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			
	1	Pelatihan dan diklat	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pelatihan dan Diklat	13 org	249.893	Terlaksananya Pelatihan dan Diklat	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Pelatihan dan Diklat	13 org	249.893	

No.		Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Program	Lokasi	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program	Lokasi	Indikatr	Target Pagu indikatif		
		Kegiatan		Kinerja	Capaian	(Rp. 000)	Kegiatan		Kinerja	Capaian (Rp. 000)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kab. Kapuas Hulu .	Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD	19 laporan	7.000	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Kab. Kapuas Hulu .	Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD	19 laporan	7.000	
	IV	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas	40,21%	024.846	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Capaian pengendalian dan pengamanan lalu lintas	40,21%	3.024.386	
	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat	Kab. Kapuas Hulu	Terpasangnya rambu lalu lintas jalan	Rambu 235	389.450	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat	Kab. Kapuas Hulu .	Terpasangnya rambu lalu lintas	Rambu 235	389.450	
	2	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Sungai	Kab. Kapuas Hulu	Terpasangnya rambu lalu lintas Sungai	Rambu 23	168.550	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Sungai	Kab. Kapuas Hulu .	Terpasangnya rambu lalu lintas Sungai	Rambu 23	168.550	
	3	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung terminal	Kab. Kapuas Hulu .	Tersedianya sarana halte dan steigher	15 unit	1.311.590	Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung terminal		15 unit	1.311.590	15 unit	
	IV	Program Peningkatan pelayanan angkutan		Capaian peningkatan pelayanan angkutan	77,83%		Program Peningkatan pelayanan angkutan		Capaian peningkatan pelayanan angkutan			
	1	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Kapuas Hulu .	Terujinya kendaraan bermotor wajib uji	1000 kend	57.904	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kab. Kapuas Hulu .	Terujinya kendaraan bermotor wajib uji	1000 kend	57.904	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang SKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2019 Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana Tabel VII.

Tabel VII.
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan

	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp. 000)	Volume	Catatan
1.	Urusan Perhubungan					
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
	Pengadaan Speed Boat 40 HP	Desa Jongkong Kanan Kecamatan Jongkong	Tersedianya Sarana angkutan sungai untuk masyarakat	75.000	1 unit	APBD Kab
	Pembangunan Dermaga Mini Apung	Ds. Kandung Suli Kec. Jongkong	Fasilitas Sarana ASDP	220.000	1 unit	APBD Kab
	Halte Sungai	Desa Penian Jaya Kec. Jongkong	Fasilitas Sarana ASDP	100.000	1 unit	APBD Kab
	Halte Sungai	Dusun Peredah/Kuala Bunut Kec. Bunut Hilir	Fasilitas Sarana ASDP	100.000	1 unit	APBD Kab
	Halte Sungai	Desa Semitau Hulu Kec. Semitau	Fasilitas Sarana ASDP	100.000	1 unit	APBD Kab
	Halte Sungai	Desa Nanga Manday Kec. Semitau	Fasilitas Sarana ASDP	100.000	1 unit	APBD Kab
2.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					
	Steigher/pendopo	Dusun Sumpak Kec. Suhaid	Fasilitas Sarana ASDP	100.000	1 unit	APBD Kab
		Dusun Ulak Landau Kec. Jongkong	Fasilitas Sarana ASDP	100.000	1 unit	APBD Kab
		Semayus Bajau Andai Kec. Empanang	Fasilitas Sarana ASDP	100.000	1 unit	APBD Kab
		Desa Bekuan Kec. Seberuang	Fasilitas Sarana ASDP	100.000	1 unit	APBD Kab
		Dusun Setia Kec. Jongkong	Fasilitas Sarana ASDP	100.000	1 unit	APBD Kab

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalantol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan ke-unggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tataruang.

2. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan

3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Pelaksanaan SPM bidang perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang.

1) Bidang Perhubungan

Tabel VIII
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
			Indikator		
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2021
			2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	2021
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	2021
			4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	2021
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	2021
		4 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 1000 (seribu) kendaraan wajib uji.	60%	2021
		5 Sumber Daya Manusia (SDM)	7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	2021
			8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	2021
		6 Keselamatan	9 Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	2021

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan

B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, tujuan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2019 adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan Dinas Perhubungan yang Lebih Baik
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel IX
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target (%)
1	2	3	4
Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan Dinas Perhubungan yang Lebih Baik	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Meningkat nya Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu	B
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Meningkatkan Kelancaran dan Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan	70%

C. Program dan Kegiatan

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan adalah 8 program, terdiri 5 program Setiap SKPD dan 3 program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 40 kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2019 sumber dana APBD Kabupaten, dan APBN sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa Pengamanan dan kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
14. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
15. Penyusunan RKA dan DPA
16. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
17. Penyediaan Jasa Publikasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
2. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan Formal

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari :

1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2. Pendataan dan pengelolaan Aset Dinas Perhubungan
3. Laporan LPPD Dinas Perhubungan

f. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terdiri dari :

1. Monitoring sarana dan Prasarana Sungai dan Danau
2. Pengawasan dan pengawalan Lalu Lintas Jalan
3. Manajemen lalu lintas sungai dan danau
4. Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan
5. Koordinasi dalam pelayanan angkutan tingkat provinsi
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas Umum ASDP
7. Pelayanan KIR keliling
8. Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan lokasi parkir

g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari :

1. Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (Pekerjaan pembangunan Halte Sungai, tambatan perahu, steigher dan dermaga apaung mini)
2. Pembangunan tambatan Perahu/Lanting

- 3. Pengadaan Mobil Angkudes
- 4. Perencanaan untuk DED Pembangunan Dermaga Penyeberangan

h. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- 1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat
- 2. Penyediaan lampu jalan kota

D. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana Tabel XIII di bawah.

Tabel XIII
Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

No	Uraian	Target
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	60.000.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	45.500.000
3	Retribusi Terminal	
	Pelayanan tempet parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis	15000.000
4	Retribusi Pelabuhan	
	Restribusi Jasa ke Pelabuhan	49.500.000
5	Restribusi Penyeberangan air	
	Restribusi Penyeberangan air	20.000.000
6	Restribusi Izin Trayek	
	Restribusi Izin Trayek Angkutan Umum	10.000.000
Jumlah		200.000.000

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERHUBUNGAN

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah ditentukan dalam pembahasan Anggaran tahun 2019, yang mana terdapat 8 Program kerja dan 40 kegiatan dengan rincian :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN KAPUAS HULU

Kode SKPD : 1.02.09.01

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode						Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	09	01	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1,800,650,240				1,747,610,240
					001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase Surat Menyurat	Dishub	12 bln	12,650,000	APBD		1 tahun	12,650,000
					002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	Dishub	12 bln	67,200,000	APBD		1 tahun	67,200,000
					006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional untuk menunjang kelancaran pelayanan	Dishub	5 unit	12,000,000	APBD		5 unit	12,000,000
					007	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Dishub	20 org	102,600,000	APBD		20 orang	102,600,000
					008	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	satpam dan cleaning servis	Dishub	4 Org	88,157,000	APBD		4 orang	88,157,000
					009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Peralatan kerja	Dishub	50 Unit	32,894,740	APBD		50 Unit	32,894,740
					010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Dishub	12 bln	38,710,000	APBD		12 bln	38,710,000
					011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan	Dishub	12 bln	32,852,000	APBD		12 bln	32,852,000
					012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dishub	12 bln	7,129,000	APBD		12 bln	7,129,000
						Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor komputer	Dishub	6 set	48,000,000	APBD		5 unit	50,000,000
						Kegiatan pengadaan Peralatan mebeler Kantor	jumlah Peralatan mebeler Kantor	Dishub	10 set	50,000,000	APBD		10 set	30,000,000
						Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah tangga	jumlah Peralatan dapur dan rumah tangga AC	Dishub	6 unit	50,000,000	APBD		1 unit	11,000,000

					015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dishub	8 Penerbit	26,496,000	APBD		8 Penerbit	26,496,000
					017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman	Dishub	49 org	194,040,000	APBD		50 org	198,000,000
					018	Kegiatan Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	jumlah pegawai rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dishub	50 Org	481,727,000	APBD		50 Org	481,727,000
					019	Kegiatan Rapat -rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam Daerah	jumlah pegawai kunjungan kerja dalam daerah	Dishub	100 Org	202,960,000	APBD		100 Org	202,960,000
					026	Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen Pengadaan Barangdan Jasa	Dishub	25 dokumen	37,444,500	APBD		25 dokumen	37,444,500
					031	Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	jumlah dokumen perencanaan RKA dan DPA	Dishub	6 Dokumen	4,890,000	APBD		6 Dokumen	4,890,000
					036	Kegiatan Jasa Pendukung Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dishub	15 org	293,400,000	APBD		15 org	293,400,000
					066	Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi	jumlah Spanduk dan Iklan Koran	Dishub	25 Buah	17,500,000	APBD		25 Buah	17,500,000
1	02	09	01	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	Dishub	13 Unit	1,308,000,000				342,286,000
					05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan Dinas/operasional roda dua	Dishub	2 Unit	140,000,000	APBD		3 Unit	64,286,000
						Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional roda Empat	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Roda empat	Dishub	1 Unit	350,000,000	APBD			
						Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Patroli Roda Empat	jumlah kendaraan Dinas/operasional patroli roda empat	Dishub	1 Unit	280,000,000	APBD			
						Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jumlah Kendaraan operasional perawatan LPJU	Dishub	1 Unit	260,000,000	APBD			
					024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	persentase Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik	Dishub	7 Unit	278,000,000	APBD		7 Unit	278,000,000
1	02	09	01	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE KEHADIRAN PEGAWAI	Dishub	147 stel	-				127,400,000
					002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Stel pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Dishub	-	-	APBD		98 Stel	88,200,000
					005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik, Olahraga	Dishub	-	-	APBD		49 Stel	39,200,000
1	02	09	01	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE APARATUR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN BIMTEK	Dishub	12 Orang	193,940,000				205,000,000
					001	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal / bintek	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal / bintek	Dishub	12 Orang	193,940,000	APBD		15 Orang	205,000,000

1	02	09	01	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	persentase penyusunan pelaporan capaian kinerja tepat waktu	Dishub	6 Dokumen	61,131,850				61,131,850
					004	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dishub	1 dokumen	4,431,850	APBD		1 dokumen	4,431,850
					038	Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	jumlah dokumen Pengelolaan Aset	Dishub	4 Dokumen	37,200,000	APBD		4 Dokumen	37,200,000
						Kegiatan Penyusunan Renja DISHUB	jumlah dokumen Renja Dishub	Dishub	1 dokumen	6,500,000	APBD		1 dokumen	6,500,000
						Kegiatan Penyusunan LAKIP	jumlah dokumen LAKIP Dishub	Dishub	1 dokumen	6,500,000	APBD		1 dokumen	6,500,000
					042	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	jumlah dokumen LPPD	Dishub	1 dokumen	6,500,000	APBD		1 dokumen	6,500,000
1	02	09	01	01	17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ORANG DAN BARANG	Dishub	15%	3,899,657,000	APBD			723,797,650
					010	Kegiatan Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	tertib berlalu lintas di jalan	Kabupaten Kapuas Hulu	1 tahun	151,250,000	APBD		1 tahun	151,250,000
					011	monitoring sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau	laporan monitoring	Kabupaten Kapuas Hulu	10 lokasi	140,000,000	APBD		10 lokasi	137,395,150
					014	Manajemen Lalu Lintas Angkutan sungai dan danau	jumlah lokasi lalu lintas angkutan sungai dan danau	Kabupaten Kapuas Hulu	6 lokasi	150,000,000	APBD		5 lokasi	148,865,500
					015	pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan	jumlah pelajar pelopor keselamatan LLAJ	Kabupaten Kapuas Hulu	3 org	46,242,500	APBD		3 org	46,242,500
					027	Pemeliharaan Fasilitas Umum ASDP	jumlah fasilitas Umum ASDP	Kabupaten Kapuas Hulu	5 unit	15,000,000	APBD		5 unit	72,380,000
						Kegiatan Pengadaan Speed Boat untuk sarana ASDP	jumlah Speedboat untuk Petugas ASDP di Lapangan	Kabupaten Kapuas Hulu	2 unit	250,000,000	APBD			
						Kegiatan Pengadaan Ponton dan Kapal Dorong	jumlah Ponton dan Kapal Dorong	Kabupaten Kapuas Hulu	2 unit	3,000,000,000	APBD			
					033	Kegiatan Pelayanan KIR Keliling	jumlah kecamatan yang dilaksanakan KIR keliling	Kabupaten Kapuas Hulu	200 unit	41,000,000	APBD		300 unit	61,500,000
					034	Pengamanan Hari-hari besar Keagamaan dan Lokasi Parkir	Lokasi kegiatan aman dan teratur	Kabupaten Kapuas Hulu	1 tahun	106,164,500	APBD		1 tahun	106,164,500

1	02	09	01	01	18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	PERSENTASE JUMLAH DERMAGA, HALTE, STEIGHER DAN TAMBATAN PERAHU	Kabupaten Kapuas Hulu		3,140,000,000				11,210,000,000
					002	Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi dan Gedung Terminal (Pekerjaan Pembangunan Halte Darat dan Terminal Pedesaan)	Jumlah Halte Darat dan Terminal Pedesaan	Kabupaten Kapuas Hulu	2 lokasi	140,000,000	APBD		3 lokasi	210,000,000
					003	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	Jumlah tambatan perahu/lanting yang dibangun	Kabupaten Kapuas Hulu	20 unit	1,500,000,000	APBD		20 unit	9,500,000,000
					005	kegiatan pengadaan mobil angkutan pedesaan (ANGKUDES)	jumlah pengadaan mobil ANGKUDES	Kabupaten Kapuas Hulu	5 unit	1,500,000,000	APBN		5 unit	1,500,000,000
1	02	09	01	01	19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Persentase jumlah fasilitas jalan	Kabupaten Kapuas Hulu	6 lokasi	1,072,520,000			10 lokasi	1,092,520,000
					005	kegiatan pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Rambu-rambu Lalin darat	Kabupaten Kapuas Hulu	1 lokasi	100,000,000	APBD		1 lokasi	100,000,000
						Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan penertipan perparkiran dan lalu lintas	terlaksananya tertip perparkiran dan lalu lintas dijalan		1 keg	85,000,000	APBD			
						Kegiatan Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	jumlah Rambu-rambu Sungai, Danau dan penyeberangan	Kabupaten Kapuas Hulu	50 buah	150,000,000	APBD		50 buah	225,000,000
						Kegiatan Pengadaan Identitas/nama - nama Sunga dan Danau	Jumlah nama-nama Sungai dan Danau	Kabupaten Kapuas Hulu	100 buah	200,000,000	APBD		100 buah	200,000,000
						Kegiatan Pengadaan papan nama jalan Kabupaten	Jumlah papan nama jalan Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu	15 buah	30,000,000	APBD		15 buah	30,000,000
						Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas jalan Kabupaten	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas jalan Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu	20 buah	30,000,000	APBD		20 buah	30,000,000
						Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum	Kabupaten Kapuas Hulu	2 lokasi	300,000,000	APBD		2 lokasi	300,000,000
						Kegiatan Sosialisasi tertip lalu lintas di jalan Raya	jumlah Sekolah Menengah Tingkat Atas di 23 Kecamatan	Kabupaten Kapuas Hulu	7 sekolah	120,000,000	APBD		8 sekolah	150,000,000
						PROGRAM PENINGKATAN KALAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	KIR KENDARAAN			28,760,000				28,760,000
					008	Kegiatan Pengadaan Alat-alat KIR Kendaraan Bermotor	jumlah Alat - alat Buku, Plat, Stiker KIR untuk pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Kapuas Hulu	1000 set	28,760,000	APBD		1000 set	28,760,000
Jumlah										11,504,659,090	-	-	-	15,538,505,740

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan berdasarkan Renstra digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang perhubungan. Renja Tahun 2019 ini merupakan tahun ke – 4 pelaksanaan Renstra.

Penyusunan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu serta peran aktif stakeholder terkait.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD Kab. Kapuas Hulu,

Putussibau, Juli 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Drs. H. ABDUL HALIM

Pembina TK.I

NIP. 19600410 198910 1 002